

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan maupun ekosistem yang ada adalah air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berguna dan paling potensial dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan di bumi, dimana kebutuhan akan air terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor pertumbuhan jumlah penduduk, melainkan air juga digunakan dalam kegiatan industri dan pertanian. Air khususnya untuk pemanfaatan bagi manusia fungsinya sebagai air minum , MCK , pengairan sawah , usaha perikanan dan sebagai bahan baku industri.

Air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari adanya aliran sungai maupun sumber-sumber mata air. Kualitas aliran sungai dan sumber mata air yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran proses bercocok tanam para petani.¹

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aliran sungai dan sumber mata air serta ketersediaan yang dapat diakses dengan mudah oleh petani.

¹ Green Trust Petani 3 September 2010, Akses Air Untuk Pertanian Berkelanjutan”. Green Trust Petani. Halaman : 4-5

Oleh karena itu, akses air petani tidak lepas dari ketersediaan sumber daya air. Akses air sendiri berhubungan dengan bagaimana para petani memperoleh air. Kemudahan ataupun kesulitan akses pun dapat menjadi pengaruh terpenuhinya kebutuhan air bagi aktivitas bercocok tanam.

Namun, jika keberadaan sumber air guna irigasi saat ini semakin terancam maka akses petani terhadap air pun turut terpengaruh dan turut terancam. Selain itu pendistribusian air yang tidak merata juga ikut andil dalam permasalahan kehidupan. Selain faktor alam, faktor manusia juga berperan dalam peningkatan kelangkaan air, misal privatisasi sumber daya air, industri air minum kemasan, perubahan kawasan resapan air menjadi pemukiman, ketidak jelasan kebijakan negara dalam penguasaan dan pengelolaan air.

Ancaman terhadap akses air sendiri terkadang hadir dalam bentuk kebijakan pemerintah. Salah satunya datang dari regulasi yakni kebijakan diperbolehkannya swasta mengelola sumber daya air yang lahir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Dalam pasal 9 undang-undang tersebut menyatakan bahwa swasta dapat memperoleh hak guna usaha sebagai hak untuk mengusahakan air atas seijin pemerintah. Hak guna usaha atau pengusahaan sumber daya air yang dapat diberikan oleh swasta ini turut ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air pasal 75 ayat 6,7,8 dan 9 mengenai hak guna usaha air.

Peraturan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya juga mengizinkan keberadaan swasta dalam pengelolaan sumber daya air.

Misalnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. Kebijakan ini lebih sering menciptakan adanya penguasaan atas sumber daya air oleh swasta. Penguasaan atas sumber daya air pun terjadi dalam berbagai model, diantaranya adalah privatisasi air yang menimbulkan adanya komersialisasi air.

Seiring berjalannya waktu air tidak lagi dianggap barang yang mudah didapat tapi memiliki nilai kelangkaan dan keterbatasan karena adanya peningkatan permintaan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan dunia industri. Sehingga air yang dulunya hanya barang umum menjadi memiliki nilai ekonomis. Usaha-usaha yang menggunakan air bersih sebagai hasil produksinya atau penjualan air bersih berkembang dengan pesat. Maka dari itu air menjadi suatu barang komoditi yang harus mendapat perhatian khusus dan membutuhkan pengawasan dalam pemanfaatannya.

Penguasaan sumber daya air oleh swasta air menjadi hal yang banyak dijumpai di Indonesia. Banyak sumber-sumber mata air yang menjadi penopang hidup dan aktivitas masyarakat justru dikuasai lalu dikelola oleh pihak swasta saat ini. Pengelolaan air oleh pihak swasta ini dapat dibuktikan melalui data banyaknya perusahaan air minum swasta yang beroperasi di Indonesia. Terdapat perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK swasta sebanyak 2749.5²

Sebagai akibat dari pemanfaatan air yang berlebihan maka sering timbul adanya konflik. Kasus konflik perebutan air di Indonesia menjadi

² Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2014. Database Registrasi Produk Air Minum Dalam Kemasan. Jakarta.

perhatian serius yang disebabkan berbagai aspek dan melibatkan berbagai pihak baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan yang lainnya. Secara sederhana konflik yang terjadi di tingkat nasional atau wilayah dapat dikategorikan menjadi beberapa tipologi seperti konflik antara masyarakat dengan negara, konflik antar pemerintah daerah, konflik antar pemakai termasuk juga perusahaan, konflik antar masyarakat dengan kelompok industri, meskipun satu konflik dapat digolongkan dalam satu tipologi tetapi pemicu konflik juga dapat bermacam-macam sebab.³

Banyak kasus konflik perebutan air di Indonesia tercatat hingga November 2012 ada 232 kasus. Konflik tersebut terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia dengan frekuensi yang berbeda-beda tiap provinsinya. Beberapa provinsi tidak terekam karena keterbatasan data, konflik yang didokumentasikan Huma (perkumpulan untuk pembaharuan hukum berbasis masyarakat dan ekologis) hanyalah potret dipermukaan saja. Jika semua konflik berhasil diidentifikasi dan direkam jumlahnya dipastikan akan lebih besar.⁴

Masalah pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya di pegunungan, di Indonesia tampak semakin berat dan kompleks. Air sebagai sumber dari berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat, memerlukan perhatian bagi semua pemangku kepentingan. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab

³ Penyelesaian konflik Pengelolaan Sumber Daya air. Info Kajian Direktorat Pengairan dan Irigasi.

⁴ <http://www.neraca.co.id/harian/article/24364/Konflik.SDA.dan.Agraria.html> di akses 27 April 2016 pukul 13.00 WIB

pengelolaan air, dalam realitanya tidak akan mampu mengelola tanpa didukung partisipasi masyarakat.

Secara empirik, Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang memiliki sumber air bersih yang besar dan melimpah. Potensi sumber daya air ini memicu usaha-usaha yang bergerak di bidang air bersih berkembang dengan baik di daerah Kabupaten Kudus maupun sekitarnya. Hal ini dapat terlihat dari suburnya usaha penjualan air bersih baik dari depo pengisian air maupun penjualan air bersih melalui truk tangki dan industri berkaitan dengan air minum dalam kemasan yang ada di Kudus. Usaha air isi ulang tumbuh subur mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat yang menyadari pentingnya kesehatan dengan mengkonsumsi air putih yang segar, instan dan praktis.

Ada beberapa lokasi yang dimanfaatkan sumber airnya diantaranya di desa Colo, Kajar, Piji, Dukuh waringin. Menurut hasil penelitian oleh Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (LePAsP) Kudus, tentang kondisi air di Pegunungan Muria. Lembaga ini mencatat, sedikitnya 500 ribu liter air di Gunung Muria, dikuras secara ilegal dan dijual secara ilegal oleh sejumlah pengusaha. LSM ini mencatat ada beberapa pengusaha air asal Kudus yang melakukan penjarahan secara ilegal di Pegunungan Muria yaitu antara lain PT Tirta Muria, Hj Daryani, Debi Ariyadi Alha, Sugiyo, Muryanto, Supriyanto, Suroto, Budi Harso, Mardiyanto, Maksum dan Darwati dan hanya 3 perusahaan yang mempunyai ijin usaha.⁵ Untuk Desa Kajar ada 11 individu yang mengelola yakni Sondi Widayanto, Subiyanti,

⁵ <http://www.koranmuria.com/2016/04/04/34554/mengerikan-tiap-hari-500-ribu-liter-air-gunung-muria-dijarah-secara-ilegal.html> diakses pada 27 April pukul 13.20 WIB

Sulaseh, PT.Tirta Muria, Benyamin Oxsi, Muryanto, Sugiyo, Sunardi, Sugeng Riyanto, Edi Rahayu dan Bambang Suryanto

Secara kasat mata dapat dilihat setiap hari di jalanan Kabupaten Kudus terutama di Kecamatan Dawe banyak truk tangki air yang berlalu lalang. Menggunakan slogan air gunung Muria untuk menunjukkan kesegaran dan kualitasnya. Sehari paling tidak ada 35 truk kapasitas 3.000-5.000 liter pulang pergi mengambil air dari tujuh depo penyedia air di Desa Colo dan Kajar, Kecamatan Dawe. Depo air yang berada di lereng gunung itu menjual air seharga Rp 20.000-Rp 25.000 per tangki. Kemudian para pengusaha truk-truk tangki air itu menjualnya seharga Rp 100.000-Rp 500.000 per tangki kepada warga di luar Kudus dan kepada pemilik usaha air isi ulang.⁶

Hal itu menyebabkan debit air di sejumlah sumber di lereng gunung itu berkurang. Pemerintah Desa Colo pada 2011 mencatat pengambilan air terjadi di lima mata air yang berada di kawasan Jurangkulon, Kalimati, dan Guan. Mata air di kawasan itu berkurang debitnya dari 7,5 liter per detik menjadi 5 liter per detik.⁷

Berdasarkan hasil penelitian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dan Institut Teknologi Bandung, Kudus akan mengalami krisis air bersih pada 2032 atau 18 tahun lagi. Setiap tahun kondisi air bawah tanah di sejumlah sumur pantau di lereng Pegunungan Muria turun 0,8-1 meter. Eksploitasi air secara besar-besaran untuk

⁶ <http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/08/28/39676/88/40/Air-Pegunungan-Muria-Diburu-Pengusaha-Depot-Air-Isi-Ulang.html> diakses pada 27 April pukul 13.30 WIB

⁷ <http://tataruangpertanahan.com/kliping-714-tambang-air-pegunungan-muria.html> diakses pada 27 April pukul 13.40 WIB

diperjualbelikan itu juga menjadi penyumbang berkurangnya deposit air di Pegunungan Muria.⁸

Dampak negatif yang terjadi dengan adanya konflik SDA ini di Desa ajar dapat dilihat dari beberapa tahun terakhir ini, dimana kondisi tersebut berimbas ke masyarakat di lereng dan kaki Pegunungan Muria. Masyarakat di lereng Muria pun mencari sumber-sumber air baru, sedangkan masyarakat di kaki Muria meminta bantuan air karena sumur warga airnya berkurang. Selain kebutuhan rumah tangga, dampak yang ditimbulkan lainnya adalah semakin menipisnya ketersediaan pasokan air untuk irigasi pertanian warga setempat. Akibatnya, petani harus berebut air untuk mengairi sawah, karena menipisnya sumber air.

Dampak lebih lanjut dari penguasaan sumber daya alam ini adalah, menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya itu sendiri. Situasi ini mendorong terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam khususnya air. Dan pada gilirannya, eksploitasi ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, dan melahirkan konflik sosial.

Kerusakan lingkungan dan konflik tidak terlepas dari aspek kepentingan politik-ekonomi. Hal ini menunjukkan masalah kerusakan lingkungan dengan memperhitungkan aspek kekuasaan, keadilan distribusi, cara pengontrolan, kepentingan dari golongan tertentu. Kerusakan lingkungan terjadi karena adanya kesalahan dalam mengurus sumber daya alam, yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa

⁸ Koran Harian Kompas, 13 September 2014

Secara teoritis, konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu konflik sosial vertikal dan horizontal. Konflik sosial vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan Negara dan dapat dikatakan konflik laten, sebab benih-benih konflik sudah ada dan telah terpendam pada masa sebelumnya. Konflik sosial horizontal, disebabkan karena konflik antar etnis, suku, golongan, agama, atau antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh kecemburuan sosial yang memang sudah ada sejak lama.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak.⁹

Berdasarkan kaitannya dengan penulisan ini maka Sehubungan permasalahan di atas, pemerintah harus mengatur pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut kemudian dijabarkan ke dalam UU No.

⁹ Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.

7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. UU No. 7 Tahun 2004 menggolongkan air menjadi 2 (dua) yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah dan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dalam UU No. 7 Tahun 2004 pasal 3 disebutkan bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini kemudian dijabarkan dalam PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

PP No. 82 Tahun 2001 pasal 7 mengatur tentang pendayagunaan air dimana dalam ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota menyusun rencana pendayagunaan air. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota

wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. Pada ayat (3) nya disebutkan bahwa rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.¹⁰

Berdasarkan UU dan PP tersebut seharusnya pemanfaatan air permukaan dapat berjalan dengan baik. Namun, pada kenyataannya dengan adanya eksploitasi air oleh perusahaan maka hak petani untuk irigasi menjadi hilang. Warga Desa Kajar mulai mencari sumber-sumber air lain untuk disalurkan ke permukiman menggunakan pipa paralon. Ada pula warga yang menyalurkan air itu ke penampungan besar untuk diperjualbelikan. Sedangkan para pengusaha air dengan bebasnya mengeksploitasi air Gunung Muria tanpa takut terhalang regulasi karena sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah.

Banyak pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut, baik pihak dari pemerintah maupun pihak lain yang terkait. Tetapi proses penyelesaian konflik tersebut sering kali menemui jalan buntu karena regulasi sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut. Hal ini diakibatkan oleh masih lemahnya pengetahuan terhadap akar masalah konflik yang terjadi.

Akibatnya cara penyelesaian konflik sering kali merupakan formula yang bersifat sementara. Sehingga mendatangkan berbagai

¹⁰ e-journal.uajy.ac.id/2537/2/1HK09469.pdf

dampak baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, konflik ini telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian konflik ini, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama konflik berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap konflik sehingga mengurangi curahan hal yang as,a terhadap usahanya.

Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial di antara warga masyarakat. Di samping itu, selama konflik berlangsung akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak.

Dalam hal ini maka perlu dilakukan penelitian mendalam terhadap akar penyebab terjadinya konflik serta faktor penyebab dan proses penyelesaian konflik. Karena amat diperlukan guna membantu penyelesaian konflik SDA di Desa Kajar Kabupaten Kudus maka penulis mengambil judul “Analisis Konflik SDA Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Air (Studi Kasus Konflik SDA Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dan bagaimana dampak dari konflik SDA di Desa Kajar?

2. Bagaimanakah model dan hasil resolusi yang telah dilakukan dalam Konflik SDA di Desa Kajar Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana model pendekatan resolusi konflik yang paling adil dan demokratis untuk membangun perdamaian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam konflik kepentingan antara Pengusaha dengan Petani atas pemanfaatan sumber daya air di Desa Kajar Kabupaten Kudus. Namun secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan dampak konflik
2. Untuk mengetahui resolusi konflik yang pernah dilakukan
3. Untuk menganalisis dan menyusun model resolusi konflik yg efektif, berkeadilan dan demokratis

1.4 Manfaat Penelitian

- 1). Kegunaan Akademis
 - a. Memberikan sumbangan wacana baru bagi dunia akademik tentang Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - b. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan bagi penulis tentang Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - c. Menjadi suatu alternatif dalam menguraikan persoalan-persoalan Pemanfaatan Sumber Daya Air

2). Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi Pemerintah terkait dengan konflik antara Pengusaha Air dengan Petani atas pemanfaatan sumber daya air di Desa Kajar Kabupaten Kudus untuk kemudian dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar konflik dapat diminimalisir dan ditemukan penyelesaiannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab dan bentuk-bentuk konflik SDA di Desa Kajar Kabupaten Kudus sehingga dapat dijadikan percontohan konflik yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait dalam resolusi konflik sebagai pencegahan konflik serupa di daerah lain.
- c. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti melalui penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, serta menambah informasi bagi peneliti selanjutnya yang serupa.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis baca, diantaranya

Tabel 1.1
Daftar Penelitian Terdahulu mengenai Konflik SDA

No	Judul	Peneliti	Fokus Penelitian
1	Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kecamatan Minggir Sleman	Hery Listyawati	Membahas penyebab terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya air
2	Dampak pengembangan Infrastruktur Pariwisata Terhadap Konflik Air di Kabupaten Badung dan Tabanan	Hikmah Trisnawati	Membahas bagaimana dampak perkembangan Infrastruktur Pariwisata terhadap konflik air yang terjadi di Kabupaten Badung dengan melihat kondisi konflik air pada subak di Kabupaten Tabanan, dan solusi apa yang dapat digunakan dalam mengantisipasi konflik air
3	Jurnal Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam antar pemerintah Daerah dan Implikasi Hukumnya, Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air Sungai Tanang Sumatra Barat	Ade Saptomo	Membahas mekanisme pengelolaan konflik yang terjadi, dan implikasi hukumnya bagi kebijakan pembangunan hukum nasional

4	Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air Antara Petani Sawah Dan Peternak Ikan Dusun Denokan Maguwoharjo Depok Sleman	Topan Wahyudi	Membahas mengenai faktor dan bentuk-bentuk konflik yang terjadi
---	--	---------------	---

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian terdahulu mengenai Isu tentang Konflik Perebutan Sumber Daya Air di Indonesia memang sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan, konflik dalam perebutan Sumber Daya Air merupakan salah satu isu menarik yang disorot baik dari kalangan akademis maupun organisasi sosial. Diantaranya yang pertama adalah Tesis yang ditulis Hery Listyawati, berjudul *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kecamatan Minggir Sleman*¹¹. Dalam penelitian ini membahas mengenai penyebab terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kecamatan Minggir Sleman, serta pola penyelesaian dalam mengatasi konflik tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut mengulas penyebab terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan Minggir Sleman disebabkan oleh faktor hukum (pengaturan dan kelembagaan) pengaturan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi tidak menjamin kepastian hukum karena hak guna usaha air dan belum adanya pengaturan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian izin hak guna usaha air. Disisi lain sosialisasi pengaturan tentang irigasi masih kurang sehingga petani belum paham benar hak dan kewajibannya. Faktor non hukum yaitu sarana dan prasarana irigasi yang

¹¹ Hery Listyawati, *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kecamatan Minggir Sleman*, 2010. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta

kurang baik karena sudah banyak yang rusak karena faktor usia atau karena dirusak. Untuk pola pengelolaan konflik menggunakan pola non irigasi yaitu perdamaian dengan metode penyelesaian kemasyarakatan (hukum adat) melalui tahap dialog, negoisasi, mediasi dan arbitrase melalui media komunikasi forum koordinasi Van Der Wijk Sendang Pitu. Perbedaan penelitian Tesis yang ditulis Hery Listyawati, berjudul Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kecamatan Minggir Sleman dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada tujuan penelitian. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada sejarah konflik dan dampak konflik yang melibatkan para pengguna air, yakni antara Pengusaha Air Minum Isi Ulang dan Petani di Desa Kajar Kabupaten Kudus.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Hikmah Trisnawati yang berjudul *Dampak pengembangan Infrastruktur Pariwisata Terhadap Konflik Air di Kabupaten Badung dan Tabanan*¹². Dalam penelitian tersebut membahas mengenai kelangkaan air di Tabanan yang banyak digunakan pertanian. Konflik air sering terjadi baik antara petani, dengan PDAM, maupun antara sesama petani itu sendiri. Fokus dari penelitian ini ialah bagaimana dampak perkembangan Infrastruktur Pariwisata terhadap konflik air yang terjadi di Kabupaten Badung dengan melihat kondisi konflik air pada subak di kabupaten tabanan, dan solusi apa yang dapat digunakan dalam mengantisipasi konflik air baik di Kabupaten Badung maupun Tabanan. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah dengan adanya pengurangan jumlah air terutama pada musim kemarau maka sering pula terjadi sengketa yang dapat terjadi antara berbagai sektor, baik itu sesama petani,

¹² Hikmah Trisnawati, *Dampak Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Terhadap Konflik Air di Kabupaten Badung dan Tabanan*, 2011. Program DDIP Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar

petani dengan pemerintah (PDAM) maupun petani dengan investor (pemilik hotel/restoran). Sumber konflik ini dapat terjadi disebabkan oleh berbagai bentuk seperti kelangkaan air, alih Fungsi lahan pertanian, polusi air, proyek pengembangan irigasi atau lemahnya koordinasi antar pemerintah, petani, investor dalam persoalan manajemen air. Solusi yang dapat digunakan dalam konflik ini diantaranya kembali pada filosofi lokal Bali yakni menerapkan konsep Tri Hita Karana yang mampu mengatur kesinambungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan dalam mencapai kebahagiaan dalam hidup. Hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian tersebut terbatas pada dampak perkembangan infrastruktur pariwisata terhadap konflik air di Kabupaten Badung saja. Sedangkan penulis akan meneliti sejarah dan dampak konflik yang terjadi di Desa Kajar Kabupaten Kudus.

Ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Ade Saptomo yang berjudul *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam antar pemerintah Daerah dan Implikasi Hukumnya, Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air Sungai Tanang Sumatra Barat*.¹³ Jurnal ini memaparkan tentang konflik sumber daya air antara masyarakat Desa Sungai Tanang kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan Pemerintah Kota Bukit Tinggi, yang secara garis besar membahas mekanisme pengelolaan konflik yang terjadi, dan implikasi hukumnya bagi kebijakan pembangunan hukum nasional. Kesimpulan akhir dalam jurnal ini mengutarakan bahwa konflik sumber daya air disebabkan oleh dua hal pertama internal kultural berupa penguatan potensi lokal, internal struktural berupa pemberlakuan otonomi

¹³ Ade Saptomo, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah dan Implikasi Hukumnya, Studi kasus Konflik Sumber Daya Air Sungai Tanang Sumatra Barat*. Jurnal Ilmu Hukum, fakultas Hukum dan Pasca Sarjana, Universitas Andalas Padang, 2006

daerah dan pemberlakuannya. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mana dalam penelitian tersebut membahas konflik sumber daya air antar pemerintah daerah, sedangkan penulis membahas konflik sumber daya air antar petani dan pengusaha.

Keempat adalah Skripsi yang ditulis oleh Topan Wahyudi yang berjudul *Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Air antara Petani Sawah dan Peternak Ikan di Dusun Denokan Maguwoharjo Depok Sleman*¹⁴. Fokus dalam penelitian tersebut adalah mengenai faktor dan bentuk konflik. Kesimpulan akhir dari penelitian tersebut adalah Bentuk konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya air di Dusun Denokan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta adalah main belakang, hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak, baik peternak ikan maupun petani sawah. Mereka saling memperebutkan air secara sembunyi-sembunyi, saling sabotase satu sama lain, siapa cepat ia dapat, sehingga dari fenomena itu berimbas pada pola interaksi sehari-hari yang terwujud dalam sikap tidak bertegur sapa, saling boikot, fanatisme golongan yang berlebihan serta dampak kongkrit yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi yang membuka peluang adanya kelas sosial. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada sejarah konflik dan dampak konflik yang melibatkan para pengguna air, yakni antara Pengusaha Air Minum Isi Ulang dan Petani di Desa Kajar Kabupaten Kudus.

¹⁴ Topan Wahyudi, *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air Antara Petani Sawah Dan Peternak Ikan Dusun Denokan Maguwoharjo Depok Sleman*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Pengertian Konflik

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan.¹⁵

Beberapa definisi konflik menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Webster istilah conflict dalam bahasa latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak.¹⁶
- b. Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham.¹⁷
- c. Menurut Wirawan, Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.¹⁸
- d. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers: Jakarta 2006 hal 91

¹⁶ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar: Yogyakarta 2009 hal 9

¹⁷ Ibid hlm 9

¹⁸ Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik(Teori, Aplikasi, dan Penelitian), Jakarta: Salemba 2010

dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.¹⁹

- e. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan²⁰

Pengertian konflik diatas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.

¹⁹ Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998,hal.156

²⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.

1.6.2 Analisis Konflik

Menurut Fisher (2001) analisis konflik sebagai suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang, selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan. Analisis konflik dapat dilakukan dengan sejumlah alat bantu dan teknik yang sederhana, praktis dan sesuai yang dapat dikombinasikan antara satu dengan yang lainnya untuk memahami konflik, yaitu:

1) Kronologi konflik (urutan kejadian) merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk menunjukkan sejarah konflik berdasarkan waktu kejadiannya (hari/ bulan/ tahun sesuai skalanya) yang ditampilkan secara berurutan. Alat ini menjadi starting point dalam memahami konflik karena mampu mengidentifikasi interpretasi berbagai pihak terhadap suatu kejadian. Interpretasi ini dapat berasal dari satu pihak untuk digunakan bagi kepentingan mereka sendiri maupun untuk dipergunakan bersama dengan pihak lain.

2) Penahapan konflik merupakan alat bantu yang ditujukan untuk menganalisis berbagai dinamika yang terjadi pada masing-masing tahap konflik. Analisis tersebut meliputi lima tahap yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik.

3) Pemetaan konflik yang merupakan visualisasi terhadap hubungan-hubungan dinamis antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Selain ditujukan untuk mengidentifikasi masalah atau isu-isu yang

dihadapi oleh masing-masing pihak, alat bantu ini berguna untuk menganalisis tingkat dan jenis hubungan di antara pihak-pihak tersebut.

1.6.3 Sumber Konflik

Konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan kebutuhan yang selalu meningkat akan keberadaan, fungsi dan manfaat sumberdaya alam.²¹ Selain itu, diungkapkan juga bahwa sumberdaya alam yang terbatas sangat rentan terhadap perubahan, sehingga inisiatif-inisiatif industrialisasi telah menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan sumberdaya alam itu sendiri. Perubahan keadaan sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, hukum dan politik dapat menciptakan kepentingan-kepentingan baru terhadap sumberdaya perairan. Perubahan faktor-faktor tersebut apabila mengalami ketidaksesuaian, maka menyebabkan adanya suatu potensi konflik.

Menurut Dorsey dalam buku yang ditulis Mitchell menyebutkan 4 penyebab dasar konflik, yakni :

1) Perbedaan pengetahuan atau pemahaman

Perbedaan akan pengetahuan dan pemahaman dapat mengarah pada timbulnya konflik. Berbagai kelompok mungkin menggunakan model, perkiraan dan informasi yang berbeda. Konflik terjadi ketika kelompok kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan informasi yang didapatkan salah. Perbedaan fakta dan interpretasi dua kelompok terhadap suatu keadaan akan dapat menimbulkan konflik tentang apakah telah muncul persoalan, dan/ atau

²¹ Mitchell Bruce, B. Setiawan, Dwita H. Rahmi. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

penyelesaian persoalan manakah yang paling tepat. Konflik tidak harus selalu terjadi karena hal ini hanya disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara orang-orang yang berkonflik.

2) Perbedaan nilai

Konflik sering kali muncul karena perbedaan nilai. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti dalam hidupnya. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak. Sebagai contoh, pada awalnya mungkin ada kesepakatan tentang bentuk suatu persoalan serta cara penyelesaiannya, namun tetap terjadi perbedaan yang pokok pada titik akhir yang dituju.

3) Perbedaan alokasi keuntungan dan kerugian

Kesamaan penerimaan fakta, informasi dan nilai-nilai pada suatu kelompok terkadang masih menyisakan perbedaan kepentingan dalam kelompok tersebut, dimana perbedaan yang dimaksud dapat memicu munculnya konflik. Dengan demikian konflik muncul sebagai akibat dari perbedaan tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, bukan karena perbedaan pengetahuan dan perbedaan nilai. Konflik dapat terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban.

4) Perbedaan latar belakang personal dan sejarah kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Dalam hal ini terjadi karena adanya emosi negatif yang kuat, salah persepsi, salah komunikasi serta adanya tingkah laku negatif yang berulang (repetitif). Masalah ini sering menghasilkan konflik yang tidak

realistis, Dimana konflik bahkan dapat terjadi dalam kondisi obyektif, seperti terbatasnya sumberdaya atau tidak tercapainya tujuan-tujuan bersama.

Teori lain yang bisa menjelaskan tentang permasalahan konflik adalah teori yang menjelaskan hubungan antara identitas sosial suatu kelompok dengan teritori yang ditempatinya.²² Pada intinya teori ini menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara identitas sebuah kelompok sosial dengan tempat dimana mereka hidup. Keterkaitan ini bisa diwujudkan dalam bentuk konsep kepemilikan.

Lebih lanjut Adhuri (2005) menjelaskan jika terdapat wujud yang sedikit lebih lemah dari konsep kepemilikan, yaitu masyarakat lokal yang mengembangkan konsep keyakinan bahwa sebagai orang lokal mereka mempunyai hak prioritas untuk mengeksploitasi sumberdaya yang berada di sekitar tempat mereka hidup atau paling tidak, kesadaran keterikatan yang mendorong lahirnya anggapan bahwa orang lain tidak boleh mengadakan kegiatan eksploitasi dengan level yang lebih tinggi dari masyarakat lokal. Pada masyarakat yang demikian ini, maka jika terdapat orang-orang luar yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi di wilayah tersebut dan tidak dikehendaki oleh masyarakat lokal, maka konflik yang bernuansa kekerasan kemungkinan terpicu. Dalam logika ini, konflik SDA di Desa Kajar dapat berakar pada "konflik pranata" atau nilai atau juga mungkin hukum yang melingkupi pengaturan pemanfaatan air.

²² Adhuri D.S, Wahyono Ary, Indrawasih Ratna, editor. 2005. Fishing in, Fishing out : Memahami Konflik-Konflik Kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Ed ke-1. Jakarta : LIPI Press.

1.6.4 Faktor Penyebab Konflik

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker antara lain :

1) Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.

2) Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

3) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Faktor penyebab konflik menurut Turner, adalah sebagai berikut :

1. Ketidakmerataan distribusi sumber-sumber daya yang terbatas dalam masyarakat.
2. Ditariknya kembali legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah.
3. Adanya pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan.
4. Sedikitnya saluran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat kelas bawah.
5. Melemahnya kekuasaan negara yang disertai dengan mobilisasi masyarakat bawah dan atau elit.
6. Kelompok masyarakat kelas bawah menerima ideologi radikal.

1.6.5 Akibat Terjadinya konflik

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan,²³ adalah:

- 1) Bertambahnya solidaritas in-group
Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat.
- 2) Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok
Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu terjadi.
- 3) Perubahan kepribadian para individu
- 4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia

²³ Ibid, hlm 95-96

5) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

1.6.6 Teori Konflik

1) Teori Konflik Dahrendorf

Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan *consensus*). Dahrendorf dengan teori konfliknya mengemukakan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu didalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis²⁴

Dahrendorf memandang konflik dengan tiga tipe besar kelompok yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu merupakan sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik. Kelompok kepentingan adalah kelompok menurut pengertian sosiologi dan mereka adalah agen sesungguhnya dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan dan personel anggota.

Kelompok konflik, atau yang benar-benar terlibat dalam konflik kelompok, muncul dari sekian banyak kelompok kepentingan tersebut.²⁵

Dahrendorf beranggapan bahwa konsep kepentingan laten (kepentingan yang tersembunyi atau terselubung) dan manifes (kepentingan yang tampak atau terlihat), kelompok semu, kelompok kepentingan dan

²⁴ Ritzer, George, dan J. Goodman, Douglas. Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenam). Jakarta: Kencana. 2008 hlm 154

²⁵ Ibid 156-157

kelompok konflik menjadi dasar bagi penjelasan konflik sosial. Aspek terakhir dalam teori konflik Dahrendrof adalah hubungan konflik dan perubahan. Secara ringkas, Dahrendrof juga menyatakan bahwa kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan struktur sosial. Tatkala konflik semakin intens, perubahan yang terjadi pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai pula dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi dengan tiba-tiba.²⁶

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori konflik Dahrendrof mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Sama seperti pada konflik pemanfaatan sumberdaya air di Desa Kajar antara Pengusaha Air Minum Isi Ulang dengan Petani. Konflik ini memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak yaitu oleh pengusaha air minum isi ulang dengan petani Desa Kajar.

2) Teori Konflik Johan Galtung

Menurut Johan Galtung, teori segitiga konflik. Dia mengatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan kontradiksi sikap (A) dan perilaku (B) pada puncak-puncaknya

²⁶ Ibid 284-285

Gambar 1.1
Segitiga Konflik Johan Galtung

Kontradiksi



(sumber: Simon, Fisher 2011)

Melalui segitiga konflik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sebuah konflik yang tidak simetris, kontradiksi ditentukan oleh pihak-pihak yang bertikai, hubungan mereka, dan benturan kepentingan inheren antara mereka dalam berhubungan. Sikap yang dimaksud termasuk persepsi pihak-pihak bertikai dan kesalahan persepsi antara mereka dan dalam diri mereka sendiri. Jadi, ketika ada perbedaan persepsi atau ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku dapat dikatakan terjadi sebuah konflik. Selain itu, Fischer mengatakan bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Dalam perilaku konflik, ada yang dinamakan sebuah konflik laten, ketika konflik tersebut sifatnya tersembunyi dan belum diangkat ke permukaan.²⁷

Galtung melihat konflik sosial sebagai salah satu bentuk produk hubungan sosial yang dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu :²⁸

²⁷ Fischer, Simon dkk. 2001. *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak (terj.)*. Jakarta: British Council. Hal.6

²⁸ Galtung, Johan. 2003 *Kekerasan kultural, Jurnal ilmu sosial transformatif*. Insit Press. Yogyakarta . Hal 88

1. Konflik Kultural (kekerasan Cultural)

Kekerasan kultural adalah kekerasan yang melegitimasi terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung serta menyebabkan tindakan kekerasan dianggap wajar saja atau dapat diterima oleh masyarakat.

2. Konflik Struktural (kekerasan struktural)

Kekerasan struktural adalah kekerasan yang berbentuk eksploitasi sistematis disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan itu, kebijakan yang menindas, perundang0undangan yang diskriminatif. Kekerasan struktural ini termanifestasi dalam bentuk ketimpangan kekuasaan dan ekonomi yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan hidup.

3. Konflik kekerasan (kekerasan langsung)

Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terlihat secara langsung dalam bentuk kejadian, sehingga kekerasan jenis ini sangat mudah diidentifikasi karena merupakan manifes dari kekerasan kultural dan struktural.

Dalam Segitiga Konflik Galtung memperlihatkan berbagai individu, kelompok, dan organisasi membawa angka kepentingannya masing-masing. Kepentingan bisa berwujud ekonomis maupun politis. Dua kelompok sosial dengan kepentingan ekonomis dalam satu lingkungan yang sama, misalnya dua kelompok pedagang di pasar, masing-masing akan menciptakan persepsi terhadap

kepentingan kelompok diluarnya proses ini akan membawa pada bentuk perilaku-perilaku tertentu yang menciptakan kontradiksi dan situasi ketegangan.²⁹

Konflik itu ada karena satu perbedaan yang menyulut ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan bersama antara dua pihak. Dengan kata lain ada alternatif yang tidak dapat dipilih. Inilah yang disebut konflik manifes atau konflik substantif. Konflik manifes ini timbul karena tidak ada kesepakatan atau kesatuan pendapat dari alternatif yang ada, sehingga setiap konflik pasti mempunyai akar permasalahannya. Akar konflik bisa bersumber dari kepentingan atau tujuan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Berdasarkan Sifatnya, konflik dibagi atas tiga yaitu:

1. *Specific Conflict*, Specific conflict adalah sebuah konflik yang bersumber dari masalah-masalah yang sifatnya spesifik (khas) misalnya dalam konteks ideologi, warisan berupa budaya, kepercayaan, tradisi serta wilayah.
2. *General Conflict*, General Conflict adalah suatu konflik dimana sifat konflik tersebut memiliki nilai kesamaan yang bersifat umum dalam arti kata meskipun konflik itu pada awalnya hanya melibatkan dua pihak secara langsung akan tetapi akibat adanya kesamaan (keterkaitan) maka mengakibatkan keterlibatan pihak lain. Misalnya masalah agama, Etnis, HAM, Lingkungan hidup, dan Ancaman Nuklir.
3. *Inter-Connected Conflict*, Inter-connected conflict adalah suatu konflik yang saling kait-mengkait dimana pada awalnya konflik itu diakibatkan hanya karena

²⁹ Novri Susan, : 2010 Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, Jakarta, hlm. 90

satu persoalan, akan tetapi setelah kejadian merembes ke persoalan lainnya baik dari segi substansi maupun aktornya³⁰

1.6.7 Konflik Sumberdaya Air

Konflik berarti perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya suatu masyarakat.

Konflik sumberdaya air didefinisikan sebagai situasi sosial yang sedikitnya dua pengguna air dalam waktu bersamaan berusaha memperoleh akses terhadap sejumlah sumberdaya air tertentu. Konflik sumberdaya air selain memberikan dampak negatif yang berupa kebringasan massa juga memberikan ruang artikulasi, sehingga kepentingan satu pihak akan diketahui pihak lain, dicarikan kompromi dan pemecahannya.³¹

Konflik sumber daya air tidak hanya terjadi di daerah kering. Konflik air bahkan bisa juga merambah daerah basah. Secara umum, sektor sumber daya air di Indonesia menghadapi permasalahan jangka panjang terkait dengan pengelolaan dan tantangan investasi, yang akan mempengaruhi pembangunan ekonomi negara dan menyebabkan berkurangnya keamanan pangan, kesehatan masyarakat dan kerusakan

³⁰ <http://hasyimwordpress.com/Sifat-Sifat-Konflik> ,diakses KAMIS, 13 Juli 2013, 09:24 Wib

³¹ Y. Priyo Utomo 1993, Pengantar Sosiologi: buku panduan mahasiswa, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.

lingkungan. Pada tingkat kebijakan dan pelaksanaan, mengenai sumber daya air terdapat beberapa permasalahan spesifik sebagai berikut:

- a) Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu.
- b) Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan penurunan permukaan tanah.
- c) Menurunnya kemampuan penyediaan air. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun semakin tajam.

- d) Meningkatnya potensi konflik air. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, pertanian maupun industri juga semakin meningkat.
- e) Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi.

1.6.8 Resolusi konflik

Resolusi Konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Dalam penjabaran konsep ini penulis mendasarkan tulisannya pada pendapat Johan Galtung mengenai resolusi konflik. Menurut Galtung, resolusi konflik di bagi pada tiga tahapan yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peace building*.

Galtung mendeskripsikan *peacemaking* sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. *Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Sedangkan *peace building* merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang berkesinambungan.

Peacemaking merupakan sebuah strategi upaya dalam mengakhiri sebuah kekerasan penyebab konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pihak yang bertikai misalnya pengadaan sebuah perjanjian tertulis yang melibatkan mediator. *Peacekeeping* adalah proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi selanjutnya. *Peace building* adalah proses pengimplementasian perubahan atau rekonstruksi sosial, politik maupun ekonomi demi tercapainya *sustainable peace*. Dari ketiga tahapan resolusi konflik tersebut diharapkan terciptanya transformasi *negative peace (the absence of war)* menjadi *positive peace* dimana semua lapisan masyarakat akan merasakan keadilan sosial, kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi.³²

Resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*).³³

³² Aleksius Jemadu, (2008) Politik Global dalam Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta

³³ Wirawan, (2010), Konflik dan Manajemen Konflik(Teori, Aplikasi, dan Penelitian), Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 177

1.6.8.1 Pengaturan Sendiri

Dalam metode resolusi konflik pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat konflik menyusun strategi konflik dan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibat konfliknya.³⁴

- a. Interaksi konflik dengan keluaran yang diharapkan mengalahkan lawan konflik (win & lose solution).

Dalam interaksi konflik model ini, pihak yang terlibat konflik bertujuan untuk memenangkan konflik dan mengalahkan lawan konfliknya

- b. Interaksi konflik dengan tujuan menciptakan kolaborasi atau kompromi (win & win solution).

Proses resolusi konflik dapat melalui interaksi konflik

- c. Interaksi konflik menghindar.

Tujuan dari proses resolusi konflik menghindar adalah menghindarkan diri dari situasi konflik

- d. Interaksi konflik mengakomodasi

Interaksi konflik mengakomodasi bertujuan untuk menyenangkan lawan konflik dan mengorbankan diri.

Resolusi konflik tanpa kekerasan dan dengan kekerasan

- a. Resolusi konflik tanpa kekerasan

Resolusi konflik tanpa kekerasan (non-violent) adalah resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik dengan

³⁴ Ibid, hlm. 178-182

tidak menggunakan kekerasan fisik, verbal, dan non verbal untuk mencapai resolusi konflik yang diharapkan.

b. Resolusi konflik dengan kekerasan

Resolusi konflik dengan kekerasan (violent) adalah perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konfliknya untuk memenangkan konflik.

1.6.8.2. Intervensi Pihak Ketiga

Resolusi konflik melalui pihak ketiga merupakan kontinuum dari intervensi pihak ketiga yang keputusannya tidak mengikat. Keputusan hanya mengikat para pihak yang terlibat konflik sampai pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan mengenai konflik.³⁵

a. Resolusi konflik melalui proses pengadilan

Dalam resolusi konflik melalui pengadilan perdata, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata di Pengadilan Negeri melalui gugatan penggugat kepada tergugat.

b. Resolusi konflik melalui proses atau pendekatan legislasi

Resolusi konflik melalui pendekatan legislatif adalah penyelesaian konflik melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif.

c. Resolusi konflik melalui proses administrasi

³⁵ Ibid, hlm. 184-214

Resolusi konflik melalui proses administrasi adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara bukan lembaga yudikatif yang menurut undang-undang atau peraturan pemerintah diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam bidang tertentu.

d. Resolusi perselisihan alternatif

Resolusi perselisihan alternatif (arbitrer of arbitrer resolution-ADR) adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan dan proses administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. ADR terdiri atas mediasi dan arbitrase.

1.6.8.2.1 Mediasi

Resolusi konflik melalui mediasi adalah proses manajemen konflik pihak-pihak yang terlibat konflik menyelesaikan konflik mereka melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan indikator antara lain yaitu:

a. Proses

Mediasi merupakan proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik dan mediator

b. Menyelesaikan konflik melalui negosiasi

Inti dari mediasi adalah pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan untuk melakukan negosiasi

c. Mencapai kesepakatan

Tujuan daripada mediasi adalah mencapai kesepakatan atau solusi mengenai objek konflik. Kesepakatan tersebut ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik itu sendiri.

d. Bantuan mediator

Oleh karena pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri konflik mereka, bantuan mediator diperlukan untuk menyelesaikan konflik mereka.

e. Intervensi mediator

Intervensi artinya mediator memasuki sistem hubungan konflik, berada di antara pihak-pihak yang terlibat konflik secara imparial untuk mengubah kekuasaan, pola pikir, kepercayaan, dan dinamika konflik dengan cara memberikan informasi agar terjadi negosiasi yang lebih baik sehingga tercapai kesepakatan.

1.6.8.2.2 Arbitrase

Arbitrase merupakan proses penyelesaian konflik sukarela di mana pihak-pihak yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga yang imparial (tidak memihak) dan netral untuk membuat keputusan mengenai objek konflik. Keluaran dari keputusan arbitrase bisa bersifat nasihat dan tidak mengikat atau bisa juga berupa keputusan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik.

Konstrak arbitrase mengundang sejumlah dimensi yaitu:

a. Arbiter.

Pihak ketiga yang bersifat imparial dan netral serta berfungsi membantu pihak-pihak yang terlibat konflik dalam menyelesaikan konflik.

b. Hubungan arbitrer dengan pihak yang terlibat konflik.

Para pihak yang terlibat konflik meminta arbitrer untuk membantu mereka menyelesaikan konfliknya.

c. Proses arbitrase.

Jika terjadi konflik, para pihak yang terlibat konflik menemui arbitrer. Arbiter akan melakukan dengar pendapat dengan mereka.

d. Keputusan.

Dari alternatif-alternatif yang ada, arbitrer memilih salah satu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik.

1.6.8.3 Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan proses resolusi konflik yang mentransformasi ke keadaan semula sebelum terjadinya konflik, yaitu keadaan kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) kata rekonsiliasi artinya perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Disamping kata rekonsiliasi ada kata konsiliasi yang artinya

mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Dalam manajemen konflik istilah konsiliasi dan rekonsiliasi dikenal sebagai proses manajemen konflik untuk menciptakan solusi konflik.

1.6.9 Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

a. Dampak positif dari adanya konflik

1. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* satu kelompok.³⁶ Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam satu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan

³⁶ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.

langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.

2. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

b. Dampak negatif dari adanya konflik

1. Hancurnya kesatuan kelompok.³⁷ Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
2. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.³⁸
3. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik

³⁷ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 377

³⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 70.

1.7 Pemetaan Konflik (*mapping of conflict*)

Dalam kaitannya dengan analisis konflik, terdapat suatu metode yang disebut pemetaan konflik. Menurut Fisher pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak - pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak - pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.³⁹

Adapun pemetaan konflik itu memiliki beberapa tujuan. Pertama, yaitu untuk memahami situasi konflik secara lebih baik. Dengan menghadirkan hal-hal yang terkait dengan konflik -seperti para pihak yang terlibat dalam konflik (baik pihak utama maupun pihak di lingkaran berikutnya (termasuk pihak ketiga yang berusaha menangani konflik), bagaimana relasi antara para pihak tersebut, apa yang menjadi isu yang dikonflikkan, mana atau siapa dari para pihak itu yang memiliki potensi lebih besar untuk menyelesaikan konflik, dll.- dalam bentuk simbol misalnya garis lurus, garis lurus tebal, garis bergelombang, tanda panah, gambar empat persegi panjang, atau simbol lainnya maka gambaran dan pemahaman tentang konflik akan mudah ditangkap.

Kedua, yaitu untuk melihat dengan lebih jelas hubungan antara para pihak yang terlibat atau terkait, baik langsung maupun tidak langsung

³⁹ Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, The British Council, Indonesia, Jakarta.

dalam konflik, bahkan di mana posisi kita (pihak ketiga) yang berusaha untuk melakukan mediasi berada, dll. Karena keadaan dan sifat hubungan antara para pihak yang terlibat dalam konflik itu beragam, maka pembacaan terhadap hubungan tersebut melalui visualisasi simbol akan mudah ditangkap dan diingat dibandingkan bila hanya diterangkan secara naratif. Di samping itu, sejalan dengan sifat konflik yang selalu bergerak atau berubah (*dynamic and changing*), maka peta hubungan yang direpresentasikan dalam simbol tertentu (sesuai dengan keterangan tentang seluruh simbol yang dipakai dalam peta konflik yang dibuat) akan dengan mudah diganti atau disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan aktual yang terjadi pada konflik. Bagaimana perkembangan dan perubahan konflik yang terjadi di lapangan dapat diikuti dengan mudah oleh pihak ketiga yang menangani konflik. Dengan demikian kondisi terkini (*up to date*) dari konflik selalu berada dalam pengamatannya.

Ketiga, yaitu untuk mengklarifikasi dimana kekuatan (utama) itu terletak. Maksudnya, dengan terpetakannya para pihak dan hubungan antara mereka dalam peta konflik, maka secara mudah pula diketahui kekuatan masing-masing pihak di dalam mempengaruhi (baik positif maupun negatif) terhadap keadaan dan perkembangan konflik.

Keempat, yaitu untuk mengecek sendiri keseimbangan aktifitas atau kontak seseorang. Melalui peta konflik yang menghadirkan juga bagaimana hubungan antara para pihak yang terlibat dalam konflik, maka frekuensi dan intensitas komunikasi dan aktivitas antar para pihak (termasuk pihak ketiga yang menangani konflik) dapat dipantau. Hal ini

akan membantu juga bagi pihak ketiga untuk menemukan celah dan jalur yang dapat dilalui dan digunakan secara tepat untuk memaksimalkan usaha pengambilan tindakan dalam penanganan konflik dari sudut lalu lintas hubungan antar para pihak yang berkonflik tersebut.

Kelima, yaitu untuk melihat dimana sekutu atau aliansi atau sekutu potensial berada. Tergambarkannya bagaimana sifat dan keadaan hubungan antar para pihak yang terlibat dalam konflik, secara otomatis akan mempermudah pemetaan para pihak dalam kelompok-kelompok atau kategori-kategori tertentu, misalnya mana sekutu dan mana lawan dari para pihak yang terlibat dalam konflik. Penemuan mana sekutu dan mana lawan dalam konteks ini, akan memudahkan kerja praktisi yang menangani konflik untuk memanfaatkan mereka dalam penanganan konflik sesuai dengan kedudukan dan potensinya masing-masing dalam hubungan antar mereka.

Keenam, yaitu untuk mengidentifikasi pembukaan untuk intervensi atau pengambilan tindakan. Kapan waktu untuk melakukan intervensi dan darimana intervensi itu dilakukan juga akan dapat diketahui dengan lebih simple melalui peta konflik ini. Sebagaimana yang dipraktekkan dalam dunia militer, penentuan strategi dan serangan terhadap posisi musuh berikut dengan segala antisipasi akan respon musuh dapat dirancang dengan mudah melalui visualisasi dalam gambar peta.

Terakhir, yaitu untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan. Segala hal yang telah dilakukan oleh pihak yang menangani konflik menyangkut konflik yang ditanganinya juga akan terpantau lewat simbol

yang diberikan dalam peta konflik. Dengan demikian evaluasinya juga dapat dilakukan dengan tepat.

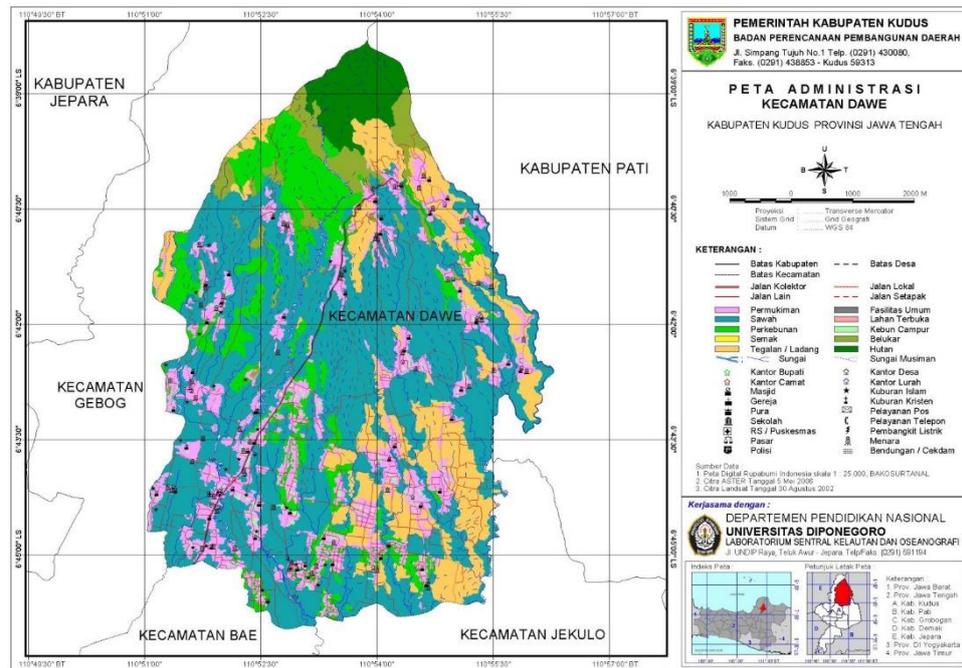
Pemetaan adalah suatu teknik yang dipakai untuk merepresentasikan konflik dalam bentuk gambar (grafis) dengan menempatkan para pihak yang terlibat dalam konflik baik dalam hubungannya dengan masalah maupun antar para pihak sendiri. Ketika orang dengan titik pandang yang berbeda memetakan situasi mereka bersama-sama, mereka belajar tentang pengalaman dan persepsi orang lain. Melalui teknik ini, konflik yang sudah dinarasikan tetapi masih sangat abstrak gambarannya dapat dengan mudah untuk diketahui dan dibaca. Teknik ini merupakan peminjaman dari teknik dalam membaca serta memahami suatu wilayah yang sangat luas dan kompleks dengan melalui gambar peta wilayah.⁴⁰

Oleh karena itu penulis akan menggambarkan dalam peta administratif Kecamatan Dawe dan Desa Kajar sebagai tempat penelitian dalam konflik SDA sebagai berikut

⁴⁰ <http://wmc-iainws.com/artikel/21-pemetaan-konflik-clonflict-mapping>

Gambar 2.1

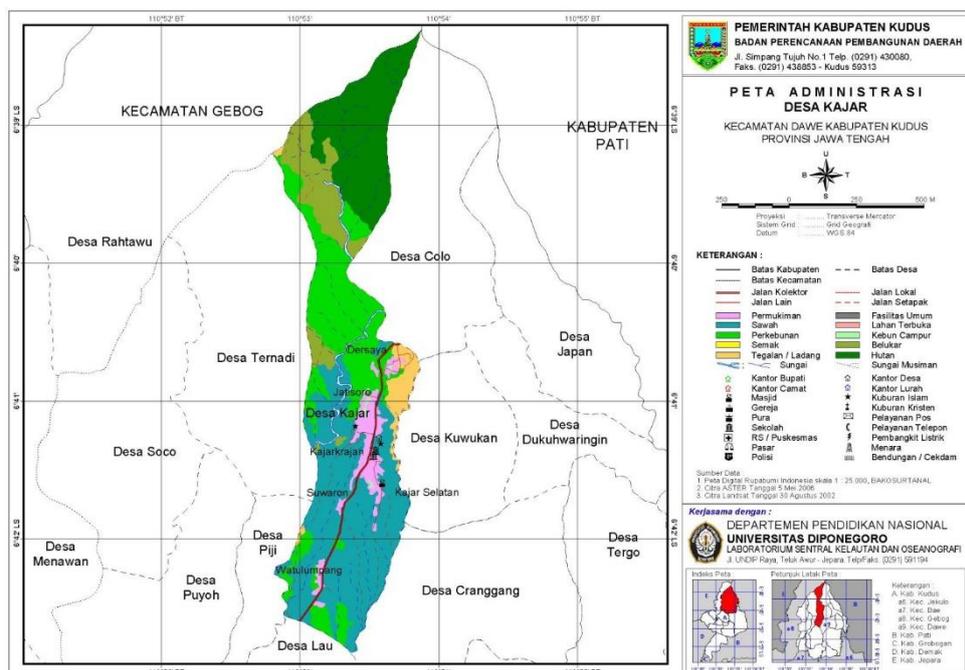
Peta Administratif Kecamatan Dawe



Kecamatan Dawe merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kudus yang terletak dibagian Utara, dan masuk dalam wilayah lereng gunung Muria, dengan jarak ± 9 km dari ibu kota Kabupaten Kudus.

Gambar 2.2

Peta Administratif Desa Kajjar



Desa Kajar merupakan salah satu Desa yang terletak di dataran tinggi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, oleh karena itu Desa Kajar memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah salah satunya adalah air. Hal itu yang menyebabkan terjadinya konflik dengan cara eksploitasi sumber daya air secara besar-besaran oleh pengusaha sehingga petani merasa dirugikan dengan adanya eksploitasi tersebut.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini peneliti akan memberikan batasan dalam konsep yang digunakan. Pembatasan pengertian tersebut akan mempermudah penulis dalam pemahaman dan juga untuk membatasi ruang lingkup penulisan. Definisi konseptualnya adalah:

1. Sumberdaya Air

Pengertian Sumberdaya air sendiri merupakan kemampuan dan kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Terdapat berbagai jenis sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air laut, air hujan, air tanah, dan air permukaan. Dari keempat jenis air tersebut, sejauh ini air permukaan merupakan sumber air tawar yang terbesar digunakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini sumberdaya air yang dimaksud adalah air tanah pegunungan Muria yang dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata 'Manfaat', yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan sumberdaya air yang dilakukan oleh pengusaha air dan petani.

3. Konflik

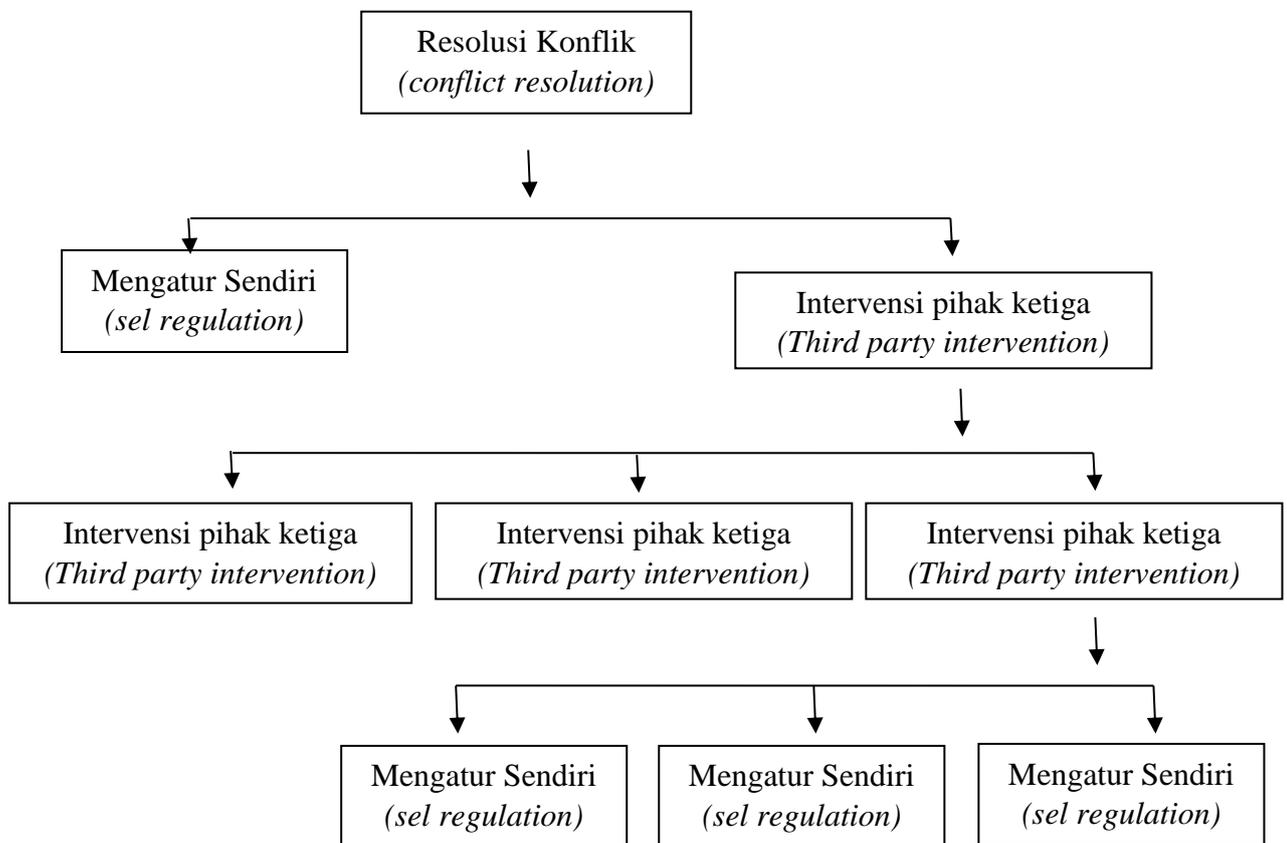
Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak.⁴¹

⁴¹ Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.

4. Resolusi

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan beberapa kajian literatur, maka desain penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan dalam suatu kerangka berpikir berikut

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



Sumber : Adopsi kerangka berpikir Wirawan (2010).

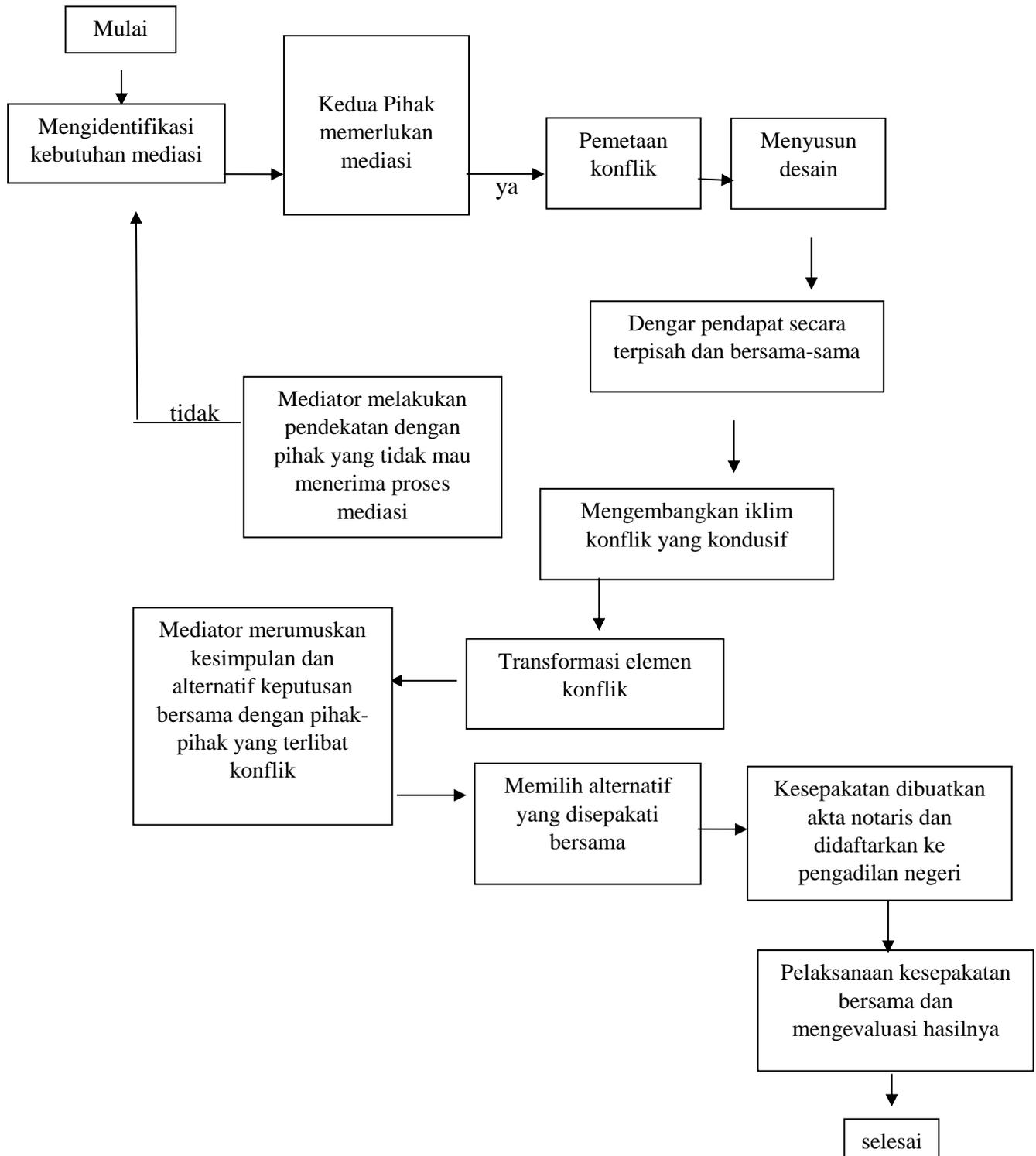
Gambar 5 menunjukkan diagram resolusi konflik. Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi pihak ketiga terdiri atas resolusi

melalui pengadilan, proses administratif dan resolusi perselisihan alternatif (*alternatif dispute resolution*).

5. Proses Mediasi Konflik

Gambar 2.5

Proses Mediasi Konflik



sumber : Wirawan (2009:208)

Dari skema diatas, dapat dijelaskan proses mediasi konflik adalah sebagai berikut :

1). Mengidentifikasi Kebutuhan Intervensi

Walaupun mediator telah mendapatkan mandat dari pihak yang terlibat konflik tetapi tingkat kebutuhan para pihak yang terlibat konflik terhadap intervensi mediator tidaklah sama. Mediator perlu memastikan bahwa kedua belah pihak mempunyai kebutuhan intervensi yang sama besarnya.

2). Pemetaan Konflik

Jika pihak-pihak yang terlibat konflik telah sepakat untuk menyelesaikan konfliknya dengan bantuan mediator, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi mengenai konflik yang akan di intervensi. Informasi tersebut meliputi antara lain sebagai berikut:

a. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat konflik

Mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam konflik. Berikut diantaranya:

1. Pihak-pihak primer. Pihak utama yang terlibat dan berinteraksi secara langsung dalam konflik. Pihak primer berupa orang, kelompok orang dalam satu organisasi atau unit
2. Pihak sekunder. Pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam konflik dan solusi konflik, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam konflik
3. Pihak ketiga yang tertarik dalam konflik. Pihak ini adalah pihak yang tertarik pada solusi konflik.

b. Analisis penyebab konflik

Mengidentifikasi semua penyebab konflik. Konflik terjadi di sekitar isu yang berkaitan dan dianggap penting oleh para pihak terlibat konflik. Isu penyebab konflik dapat dikelompokkan menjadi:

1. Isu mengenai siapa berhak mendapat apa. Isu ini berkaitan dengan sumber yang terbatas (ekonomi, kekuasaan, jabatan, hak-hak istimewa penghormatan dan sebagainya) dan masing-masing pihak menginginkannya
2. Isu mengenai bagaimana seharusnya. Isu mengenai apa yang dilakukan (rencana)
3. Isu berdasarkan fakta. Isu ini berhubungan dengan tujuan dan kebijakan, kebijakan, keputusan (harus ke mana), apa, berapa, dan sebagainya
4. Isu berdasarkan norma. Isu yang berhubungan dengan agama, norma sosial, norma kelayakan, norma hukum dan sebagainya

3). Menyusun Desain Intervensi

Desain intervensi adalah rencana intervensi yang berisi butir-butir antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan, sasaran dan target intervensi. Menentukan apa yang akan dicapai dalam proses mediasi
2. Teknik-teknik mendekati kedua belah pihak yang terlibat konflik
3. Agenda mediasi, kegiatan yang dilakukan mulai dari pertama sampai proses pengambilan keputusan, disertai teknik-teknik pelaksanaan
4. Jadwal dan lokasi pertama mediasi.

4). Melakukan Dengar Pendapat

Mediator memanggil pihak yang terlibat konflik dalam satu pertemuan dengar pendapat.

5). Mengembangkan Iklim Konflik yang Kondusif

Iklim konflik yang kondusif adalah dimana kedua belah pihak memenuhi keinginan saling Percy, saling mendengar, untuk menyelesaikan konflik, saling membutuhkan, kejujuran dan ketulusan, rasa humor, rasa *give and tauke*.

6). Transformasi Elemen Konflik

Elemen konflik adalah semua faktor dari konflik yang meliputi antara lain penyebab konflik, strategi konflik, taktik konflik, kekuasaan yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, sebagainya.

7). Merumuskan Alternatif Keputusan Bersama

Mediator berupaya menyimpulkan persamaan keinginan pihak yang terlibat konflik dan mengajukan agar mau berkompromi dan berkolaborasi

8). Memilih Satu Alternatif yang Disepakati Bersama

Pihak-pihak yang terlibat konflik sepakat untuk memilih salah satu alternatif yang dianjurkan oleh mediator dan menandatangani keputusan bersama. Hal ini bertujuan supaya tidak menimbulkan masalah ketika dilaksanakan kesepakatan diformulasikan secara operasional dengan mencantumkan angka-angka kuantitas, kualitas dan target waktunya. Dari kesepakatan hasil mediasi dibuat akta notaris dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 3 hari sejak ditandatangani oleh pihak-pihak bersengketa (Pasal 6 ayat 7 UU arbitrase)

9). Melaksanakan kesepakatan

Peran mediator membantu kedua belah pihak yang terlibat konflik dalam melaksanakan kesepakatan bersama dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kesepakatan. Kesepakatan keputusan mediasi wajib selesai dilaksanakan pada waktu 30 hari setelah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (Pasal 6 ayat 8 UU Arbitrase)

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoretis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan. Untuk mempelajari permasalahan ini, para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dari tempat penelitian. Laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup berbagai suara dari informan, reflektivitas dari peneliti, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian, serta kontribusinya pada literatur.⁴²

Metode kualitatif dalam pandangan Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah eksperimen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

⁴² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 59.

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴³ Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mencoba menggambarkan berbagai situasi, kondisi, atau berbagai realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri atau karakter tentang fenomena tertentu.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian maka pelaksanaan dalam penelitian ini dilakukan di Desa Kajar, Kabupaten Kudus khususnya pada perusahaan air minum dan masyarakat desa Kajar yang mayoritas sebagai petani. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan konflik berada di wilayah tersebut.

1.9.3 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini meliputi populasi dan sub-sub populasi. Populasi adalah individu atau unit – unit yang menjadi target penelitian yang harus memiliki batasan dan karakteristik yang sama sesuai tujuan penelitian. Dengan demikian yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kajar.

Adapun populasi dalam penelitian adalah sebagai berikut

No	Desa	Luas Wlayah (Km2)	Jumlah Penduduk
1	Kajar	5,04	4.336 Jiwa

Sumber : Kecamatan Dawe dalam Angka 2016

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 1

Setelah mengetahui populasi maka akan ditentukan sub-sub populasi yang meliputi petani dan Pengusaha Air Minum dan dari pihak Pemerintah 4 orang yakni Kepala BPSDA Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, Anggota DPRD komisi C dan Kepala Desa Kajar. Hal ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh hasil yang objektif, tepat, akurat karena mereka yang mengetahui dan mengalami konflik perebutan air didaerah tersebut.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *proporsional purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa orang saja yang dijadikan sampel penelitian yang dianggap bisa memberikan data atau informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur yang penting dalam penelitian. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Seperti hasil pengamatan (observasi), ataupun hasil wawancara. Untuk data primer ini didapatkan dengan observasi dan wawancara:

1. Interview (wawancara)

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai. Metode wawancara ini merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan untuk menggali informasi dari objek. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah kepada informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta dilakukan tidak secara formal dan terstruktur. Wawancara mendalam ini dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang paling cocok agar di peroleh data yang akurat, dan terperinci.

Informan mewawancarai petani dan pengusaha air minum yang kemudian peneliti juga akan mewawancarai Kepala BPSDA, Kepala Desa Kajar, Kepala Dinas PKPLH, serta Anggota DPRD komisi C Kabupaten Kudus. Penulis mewawancarai informan tersebut guna mengetahui konflik yang terjadi serta menanyakan berbagai fenomena yang dihadapi dalam proses pemanfaatan sumber daya air untuk kebutuhan petani dan pengusaha air minum dan untuk mengetahui resolusi apa saja yang sudah dilakukan.

2. Observasi

Metode Observasi adalah sebagai cara untuk menghimpun data atau keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan atau pencatatan sistemik terhadap gejala-gejala yang terjadi demi mendapatkan data yang jelas dari objek yang diteliti.

Penulis menggunakan metode observasi ini untuk mengamati, memonitor, dan memperoleh data yang relevan dari berbagai konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya air di Desa Kajar

Kabupaten Kudus. Adapun yang di observasi adalah lokasi penelitian, para pelaku konflik dan pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam konflik tersebut, sehingga menghasilkan data fenomena konflik. Adapun jenis penelitian ini adalah non partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan tidak melibatkan partisipasi peneliti secara langsung dalam kegiatan yang dijadikan obyek penelitian, sehingga dari hasil observasi kemudian dirumuskan dalam sebuah narasi deskriptif

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan cara melihat pustaka-pustaka, literatur serta dokumen yang menunjang. Dukomen ini berupa buku-buku, majalah, koran, makalah, jurnal-jurnal, internet, surat-surat, foto-foto yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Tujuan dilakukannya pencarian data sekunder ini ialah untuk mendukung data primer yang diperoleh dilapangan. Peneliti menggunakan data sekunder berupa foto-foto akibat dari adanya eksploitasi air, dan aktivitas dari pengusaha air minum itu sendiri.

Penulis juga menggunakan dokumentasi dan arsip-arsip yang ada di Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang relevan dengan obyek yang diteliti yaitu catatan-catatan yang berkaitan dengan konflik SDA di Desa Kajar Kabupaten Kudus. Penulis melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap klasifikasi dan analisis data.

1.9.5 Analisis dan Interpretasi Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya dan dilakukan secara mendalam. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut⁴⁴ :

1. Pengumpulan data mentah

Pada tahap ini data-data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara kemudian dibuat dalam bentuk transkrip, catatan lapangan dan gambar.

2. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Pada tahap ini data yang sudah didapatkan diolah dan dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi, agar dapat memudahkan peneliti jika data tersebut dibutuhkan pada proses lebih lanjut.

3. Membaca keseluruhan data

Data-data yang sudah dikelola dan dipersiapkan kemudian dibaca secara keseluruhan dengan menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh untuk selanjutnya dilakukan Coding

⁴⁴ Creswell, John. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4. Men-coding data

Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.

Pada tahap ini dilakukan pemberian kode pada data yang relevan, dengan langkah yaitu: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli dengan istilah-istilah khusus. Dengan begitu maka akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

5. Men-coding berdasarkan tema

Pemberian kode disesuaikan dengan tema, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Proses coding dilakukan untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, tema-tema ini diperkuat dengan berbagai kutipan.

6. Membuat deskripsi dari hasil coding

Setelah mengidentifikasi tema-tema selama proses coding, tema-tema tersebut kemudian dikaitkan antara tema yang satu dengan tema yang lainnya dalam satu rangkaian cerita atau mendeskripsikan tema tersebut.

7. Menghubungkan tema-tema/ deskripsi-deskripsi.

Setelah dilakukan coding sesuai dengan tema, maka hasil deskripsi dari tema tersebut dihubungkan dan dianalisis lebih kompleks untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis kasus.

8. Menginterpretasi tema-tema/deskripsi-deskripsi

Tahap ini memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada tahap ini peneliti menginterpretasi atau memaknai data dengan memasukkan pengalaman-pengalaman pribadi. Interpretasi dilakukan melalui perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Peneliti menegaskan apakah hasil penelitian membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya.

9. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.